

Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Untuk Membantu Menyediakan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur

Ziko N. Kawalo¹
Fanley N. Pangemanan²
Donald K. Monintja³

ABSTRAK

Rumah yang layak untuk dihuni adalah salah satu kebutuhan oleh setiap masyarakat terlebih khusus masyarakat yang belum mempunyai rumah yang layak untuk dihuni. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini guna memenuhi kebutuhan bertempat tinggal masyarakat. Desa mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur salah satunya yang telah menjalankan program bantuan ini. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui proses implementasi Program Bantuan Perumahan Swadaya Untuk Membantu Menyediakan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dimana tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur. Fokus Penelitian berdasarkan model implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:95) dimana ada beberapa variabel yang dijadikan inti dari fokus penelitian ada 6 variabel yaitu sebagai berikut : Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, Disposisi Implementor. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Dengan informan dalam penelitian ini adalah 13 orang masyarakat. Program bantuan stimulan ini sudah berjalan dengan baik karena dilihat penyalurannya sudah tepat sasaran walaupun ada masyarakat yang masih terlambat dalam pembangunan rumah dan merasa dana masih kurang. Namun bantuan BPS ini adalah salah satu bantuan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Bantuan Stimulan, Perumahan Swadaya, Masyarakat Miskin

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Tujuan Program Bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) ini yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat untuk memperbaiki rumah dari masyarakat melalui upaya dalam penyempurnaan peraturan pembangunan perumahan dengan sistem pembiayaan perumahan, meningkatkan peran aktif swasta dalam penyediaan pembangunan perumahan bahkan juga meningkatkan kualitas pengelolaan BUMN/BUMD yaitu bergerak dalam penyediaan dan pengelolaan perumahan. Sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tentunya sasaran dalam program ini adalah adanya atau terciptanya Rumah yang sehat dan layak untuk di tinggali oleh masyarakat, terhindar dari spekulasi tanah dalam perumahan dan permukiman, peningkatan pembiayaan penyediaan dana bagi pembiayaan perumahan yang asalnya dari dana masyarakat, sehingga adanya mekanisme pelaksanaan subsidi perumahan yang sudah efisien atau sudah tepat sesuai dengan kemampuan keuangan dari pemerintah, dan juga membuat kemudahan bagi masyarakat yang kurang mampu atau berpendapatan rendah untuk dapat mempunyai Rumah atau Tempat tinggal yang bagus bagi masyarakat.

Program pembangunan Rumah atau Bantuan stimulan perumahan

swadaya adalah suatu program yang dari pemerintah agar masyarakat yang kurang mampu dapat jugalah tinggal di tempat atau rumah yang layak, agar dimana masyarakat mendapat rasa nyaman dan terlindungi. Agar terbangunnya sebuah kesejahteraan dan kewaspadaan masyarakat. Pembangunan rumah yang dibangun atas upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok yang meliputi perbaikan, perluasan atau pembangunan rumah baru. Program Bantuan stimulan perumahan swadaya atau (BSPS) ini sangat membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam membangun rumah yang layak guna kesejahteraan bagi masyarakat. Perlu diketahui yaitu program bedah rumah ini sudah berjalan sejak 1969 di Jakarta untuk melakukan revitalisasi kawasan pemungkiman kumuh, mulai dari perbaikan jalan hingga sanitasi atau perilaku di sengaja didalam pembudayaan hidup yang bersih agar manusia terhindar dari kotoran ataupun bahan buangan yang berbahaya.

Desa Mogoyunggung adalah salah satu desa yang telah merealisasikan atau menjalankan program BSPS tersebut. Bantuan stimulan perumahan swadaya ini merupakan salah satu bantuan stimulan dalam hal untuk memperbaiki bahkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat agar supaya juga terjadinya peningkatan kualitas tempat tinggal atau rumah agar bisa dihuni dengan baik atau layak agar terciptanya lingkungan yang sehat dan aman agar masyarakat terhindar atau mencegah terjadinya suatu hal yang

membahayakan atau yang tidak diinginkan. Tujuan dari pemerintah juga adalah dalam hal pemberdayaan agar terciptanya kemandirian dari masyarakat agar masyarakat mampu dalam hal membangun juga meningkatkan kualitas perumahan supaya bagus atau layak dihuni oleh masyarakat tersebut.

Program bantuan stimulan perumahan swadaya ini didalam pelaksanaannya bantuan stimulan yang disalurkan kepada masyarakat yang mendapatkan yaitu pada masing-masing masyarakat penerima bantuan mendapatkan Dana dan juga bahan untuk pembuatan rumah. Program ini tentu mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Yakni memutuskan dalam peraturan menteri yang dimaksudkan dengan Pejabat Pembuat Komitmen atau disingkat dengan PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sesuai dengan Pasal 2, Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah/kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan BSPS. Peraturan menteri ini bertujuan agar penyelenggaraan Bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) terlaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel. Tentu juga program bantuan ini sudah di atur dalam

keputusan peraturan bupati bolaang mongondow tentang kebijakan pemberian bantuan sosial yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara APBN;APBD ke provinsi/kota dan kabupaten yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri no 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan mentri dalam negeri no. 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 no.541). Dalam pelaksanaannya, Program bedah rumah ini belum berjalan dengan optimal. Bahwa pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan yang terkait dengan program bedah runah ini.

Pertama, masih terkendalanya pelaksanaan program tersebut karena kurang sesuai dengan teknis dan kebijakan pelaksanaan didalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) itu sendiri. Kedua, sosialisasi mengenai program BSPS ini belum berjalan optimal. Dari masalah tersebut pelaksana harus teliti dalam tahap pelaksanaan pembangunan. Karena mempunyai rumah yang layak untuk huni adalah hak pemenuhan yang mendasar untuk rakyat Indonesia.Ketiga, yakni ada beberapa masyarakat penerima bantuan masih ditemukannya masyarakat penerima tahun anggaran tahun sebelumnya yang belum sempat menyelesaikan proses pembangunan Bedah Rumah tersebut. Dimana semestinya program bantuan pembuatan atau pembangunan rumah ini sudah dapat diselesaikan sebelum memasuki tahun anggaran bedah rumah yang baru sesuai dengan waktu

yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni selama 6 bulan.

Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini terlebih dahulu penulis berusaha untuk menelusuri penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik-topik penelitian.

Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Adam H. Albari, T.A.M. Ronny Gosal, Fanley Pangemanan (2019). Penelitian ini mengenai Implementasi Program Cerdas Command Center dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Manado). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mewujudkan smart city melalui implementasi program cerdas command center di dinas komunikasi dan informatika kota manado. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif dimana peneliti memberikan gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sesuai ruang lingkup peneliti. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yaitu : (1). Adanya program yang dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika yaitu cerdas command center menurut penulis sudah bagus. (2). Sasaran penerima manfaat program cerdas command center berdasarkan hasil yang di dapatkan oleh peneliti dilapangan bahwa belum semua masyarakat bisa menerima manfaat karena masih ada sebagian masyarakat yang belum mengerti apa itu program cerdas command center.(3). Unsur pelaksana yang melaksanakan program cerdas command center oleh dinas

komunikasi sudah berjalan tapi masih ada beberapa masalah yang ditemukan oleh pemerintah dari segi sumber daya, dan juga masih adanya ego sektoral.

Penelitian ini sangat membantu peneliti karena membahas tentang Implementasi Program dan juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian Kualitatif.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Brien Theopilus Yefta Raintung, Fanley pangemanan, Donald Monintja (2022). Penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado (Studi di Kecamatan Sario). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah pemerintah dalam menerapkan penanganan sampah berbasis kecamatan kota manado (studi di kecamatan sario). Metode penelitian yang di gunakan peneliti adalah penelitian Kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini telah di fokuskan pada penerapan kebijakan pemerintah dalam pengumpulan sampah di kecamatan sario dengan memperhatikan empat variabel dalam implementasi kebijakan publik, yakni : komunikasi, sumber daya, disposition, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan komunikasi yang dilaksanakan pihak kecamatan kepada implementor kebijakan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengumpulan sampah dapat dikategorikan baik karena aspek penyampaian informasi, kejelasan, dan konsistensi telah dilakukan pihak kecamatan dalam pengumpulan sampah di kecamatan sario. Sumber daya pihak kecamatan dalam pengumpulan sampah dapat di kategorikan cukup baik karena aspek jumlah staff dan fasilitas yang belum

sepenuhnya memenuhi untuk pengumpulan sampah tetapi dapat dimanfaatkan dengan maksimal di kecamatan sario. Disposition dalam menjalankan pengumpulan sampah dapat dikategorikan kurang baik karena aspek efek disposisi implementor dan sebagian warga belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan kerja sesuai arahan. struktur birokrasi dalam pihak kecamatan dalam mengerjakan tugas pengumpulan sampah di kategorikan baik karena aspek SOP dan fragmentasi telah dilakukan pihak kecamatan dalam pengumpulan sampah di kecamatan sario.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. fokus pembahasan penelitian ini adalah implementasi program. Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:95) menetapkan beberapa variabel yang diyakini berkaitan dengan implementasi dan kinerja kebijakan dijadikan inti dari fokus penelitian dalam beberapa variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
2. Sumber Daya
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non-human resources). Sumber daya dapat menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber

daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.

3. Hubungan Antar Organisasi
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lainnya. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antara instansi bagi keberhasilan suatu program dalam mencapai sasaran dan tujuan program.

4. Karakteristik agen pelaksana
Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah yang mencakup pada struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi di dalam suatu program.

5. Kondisi Sosial, Politik Dan Ekonomi

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi Dimana, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan yang memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Karakteristik partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Ini dapat juga menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi pada kebijakan itu sendiri.

6. Disposisi Implementor
Dalam disposisi Implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni : respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh

implementor. Ini menunjuk bahwa sikap para pelaksana menjadi variabel penting dalam proses implementasi kebijakan

Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung dengan hal yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Aparat Desa Mogoyunggung (3 orang)
2. Tim pelaksana Program (3 orang)
3. Masyarakat Penerima (7 orang)

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Pembahasan

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan yaitu harus jelas dan terukur sehingga dapat realisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara agen implementasi.

Standar dan sasaran yang ditemui dilihat dari hasil penelitian dimana pemerintah dan tim pelaksana sudah membagikan atau menyalurkan program bantuan ini kepada masyarakat sesuai dengan Standar dan kebijakan yang berlaku dimana segala kebijakan tersebut di atur dalam peraturan menteri Nomor 07/PRT/2018. Informan juga mengatakan sangat merasa senang karena program ini dapat sesuai dan tepat sasaran mengikuti segala aturan yang berlaku. Dengan mengingat jika tidak menjalankan program dengan sebagaimana mestinya nanti para pemerintah desa bisa mendapat peringatan seperti tahun yang lalu dan tidak mendapat lagi kesempatan maka dari itu pemerintah sangat selektif

dalam halnya memilih calon penerima. Mengingat tujuan pemerintah yaitu agar terciptanya rumah yang layak untuk dihuni agar membuat masyarakat nyaman untuk bertempat tinggal, sehat dan merasa terlindungi. Kemudian juga pemerintah dan tim pelaksana hanya mencai masyarakat yang sudah mempunyai tanah yang mempunyai sertifikat dan tentunya cocok atau layak menerima bantuan yakni harus masyarakat penghasilan rendah (MBR)

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Sumber daya dapat merujuk pada sumber finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.

Berdasarkan data yang ditemui dilapangan adalah sumberdaya didalamnya ada dana bantuan yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan masyarakat tersebut mendapatkan dana sebesar RP. 20.000.000 dengan perincian 17.500.000 adalah bahan material yang dapat diambil pada bagian penyalur yang berada didesa Ibolian dan sisanya 2.500.000 adalah sebagai upah tukang dalam proses pembuatan rumah. dimana masyarakat desa mogoyunggung menyelesaikan proses pembangunan rumah selama 6 bulan untuk masyarakat, namun juga ditemui ada masyarakat yang belum dapat menyelesaikan rumah sampai selesai. Dalam proses pembuatan rumah ini ada beberapa atau sebagian masyarakat yang megikuti gotong royong atau mapalus tetapi tidak semua mengikuti kegiatan yang abgus ini guna membantu masyarakat tersebut. Sementara dengan kualitas

bahan yang ditemukan masyarakat merasa bagus dan baik selama pambatan rumah bantuan berlangsung.

3. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu banyak dukungan dan koordinasi dengan instansi lainnya. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antara instansi bagi keberhasilan suatu program dalam mencapai sasaran dan tujuan program.

Berdasarkan data yang didapatkan bahwa pemerintah memang tidak melakukan sosialisasi mengenai program ini kepada seluruh masyarakat melainkan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat calon penerima yang di anggap layak untuk mendapatkan bantuan tersebut dengan cara mengunjungi. Dimana para pemerintah dan juga tim pelaksana mampu untuk menyakinkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah bahwa mereka memang pantas mendapatkan bantuan ini asalkan memang memenuhi syarat.

Memang sebelumnya ada berkas yang sulit di penuhi salah satu masyarakat yakni sertifikat tanah karena pada saat itu sertifikat belum dibuat. Namun, pemerintah dengan senang menunggu bahkan juga membantu agar proses bisa berjalan dengan cepat agar nantinya masyarakat bisa didaftarkan sebagai penerima bantuan. Dari sini sudah dapat dilihat sikap para pemerintah dan juga tim pendamping/pelaksana bahwa mereka mempunyai sifat yang baik guna kelangsungan program tersebut.

Seperti yang di katakan seorang informan Tetapi sosialisasi yang tim pelaksana dan pemerintah lakukan adalah dengan mencari dan

mengunjungi kami sebagai masyarakat yang mereka temui masih memiliki rumah yang belum layak atau juga yang belum memiliki rumah namun sudah memiliki Lahan atau tanah. Disaat itu sendiri mereka tim pelaksana (pendamping) dan pemerintah desa langsung menanyakan kepada saya jika ingin mendapatkan bantuan dari program pemerintah ini. lalu pemerintah menjelaskan kembali seperti apa mekanismenya dan bagaimana prosesnya program ini serta mereka menanyakan lagi bagaimana kesiapan kita sebagai masyarakat penerima dalam proses pembangunannya nanti. Kemudian informan juga menjelaskan hubungan informan dengantim pelaksana dan pemerintah terjalin dengan baik terkait dengan program ini.

4. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah yang mencakup pada struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi di dalam suatu program. Dilihat dari karakteristik agen pelaksana menurut hasil penelitian atau data yang telah didapatkan adalah yang terkait dengan pihak-pihak yang tergabung dalam program ini yaitu mencakup Pemerintah desa, tim pelaksana/pendamping, masyarakat penerima dan juga kementrian PUPR yang telah mengeluarkan program tersebut dianggap sudah melakukan masing-masing tugas sebagaimana mestinya. Dimana juga ada nya pengawasan yang dilakukan oleh tim pelaksana/pendamping program BSPS ini. pengawasan yang dilakukan dianggap cukup baik dengan melakukan pengecekan ditiap-tiap masyarakat penerima dapat dilihat tim

pelaksana mampu mengawasi dan menjalankan program tersebut. Sesuai dengan pernyataan dari informan : salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan dari tim pelaksana ini yaitu dimana mereka mengawasi atau memantau proses pelaksanaan atau proses pembanguna suatu rumah dari kami masyarakat penerima dimana mereka melihat sudah sampai dimana saja tahap yang kami masyarakat penerima lakukan atau sudah sampai dimana tahapan demi tahapan dalam pembuat rumah layak huni ini. informan mengatakan tim pendamping atau tim pelaksana ini turut andil dalam melakukan segala kerja mereka dimana mereka menjalankannya dengan baik dengan mereka melakukan pengawasan terhadap kami selaku masyarakat penerima termasuk informan sendiri, sehingga informan mengatakan mampu menyelesaikan rumah sebagaimana mestinya karena ada pengawasan dari tim pendamping atau tim pelaksana itu sendiri

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi Dimana, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan yang memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Karakteristik partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Ini dapat juga menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi pada kebijakan itu sendiri.

Sesuai dengan data yang ditemui dilapangan bahwa kondisi lingkungan

dari masyarakat penerima bantuan ini sudah terlihat baik dan bagus dikarenakan sudah memiliki rumah yang layak untuk dihuni dan masyarakat tersebut merasa nyaman dalam bertempat tinggal. Dari segi ekonomi dapat dilihat bahwa msih ada masyarakat yang belum semua layak mendapatkan bantuan ini ada yang sudah layak dan tidak membutuhkan tapi juga ada masih belum layak namun belum berhak karena belum memenuhi syarat yang berlaku. Masih juga ditemui masyarakat penerima tahun anggaran sebelumnya yang masih belum menyelesaikan program bantuan ini karena biaya dan masih setengah jadi atau belum rampung. Karena dana pertahunnya berbeda. Namun juga sudah ditemui ada salah satu masyarakat yang tidak mengalami kendala yang berarti dalam segala proses demi proses pembangunan. Maka sesuai dengan perkataan dari informan bahwa ditemui suatu dampak yang berarti dalam jangka yang panjang yakni dampak sosial positif dimana lingkungan sosial yang terlihat lebih bagus dan baik untuk masyarakat tempati yaitu rumah yang layak.

6. Disposisi Implementor

Dalam disposisi Implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni : respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Ini menunjuk bahwa sikap para pelaksana menjadi variabel penting dalam proses implementasi kebijakan.

Dengan melihat data yang di dapati bahwa pemerintah yang memilih salah satu kriteria masyarakat sebagai calon

penerima bantuan sudah dilakukan dengan baik dan adil sesuai aturan yang telah ditetapkan. Terlihat pemerintah tidak sembarang memilih agar nantinya terhindar dari pertikaian dan agar juga program tersebut bisa disalurkan sebagai mana mestinya. Masyarakat merasa juga program ini sudah direalisasikan dengan baik dan sebagaimana mestinya di bagikan kepada yang membutuhkan rumah yang layak. Harapan yang di inginkan oleh masyarakat agar kiranya program ini dapat berkembang leih baik lagi sesuai mekanismenya.

Sesuai dengan wawancara bersama informan : informan menjelaskan bahwa bagi informan program bantuan stimulan perumahan swadaya ini sudah di realisasikan sebagaimana mestinya walaupun belum banyak masyarakat yang layak belum menerima. Tetapi kata pemerintah tetap semua masyarakat yang layak untuk menerima tetap akan menerima bantun ini tinggal hanya mengikuti prosedur yang berlaku karena untuk mengajukan bantuan program ini hanya 10 masyarakat yang layak menerima jadi masyarakat yang belum menerima harap untuk bisa menunggu proses selanjutnya dari pemerintah dan juga pendamping itulah yang informan dengarkan dari pemerintah. Ada juga harapan dari informan mengenai program ini, informan mengatakan kiranya nanti program ini bisa terus berkembang dengan baik agar juga nantinya program ini bisa membantu masyarakat yang masih memerlukan topangan atau bantuan dari pemerintah, karena informan sudah merasakan sendiri hasil yang diterima oleh program bantuan ini karena bantuan stimulan perumahan swadaya ini adalah suatu bantuan

yang positif dan sangat bagus juga bermanfaat.

Penutup

Kesimpulan

1. Standar dan sasaran kebijakan yakni pemerintah dan tim pelaksana sudah membagikan atau menyalurkan program bantuan ini kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). sesuai dengan Standar dan kebijakan yang berlaku dimana segala kebijakan tersebut di atur dalam peraturan menteri Nomor 07/PRT/2018. sehingga pemerintah sangat merasa senang karena program ini dapat sesuai dan tepat sasaran mengikuti segala aturan yang berlaku. Dengan mengingat jika tidak menjalankan program dengan sebagaimana mestinya nanti para pemerintah desa bisa mendapat peringatan seperti tahun yang lalu dan tidak mendapat lagi kesempatan maka dari itu pemerintah sangat selektif dalam halnya memilih calon penerima. Tujuan dari pemerintah yakni membuat masyarakat meras nyaman dengan bertempat tinggal yang baik.
2. Sumber daya didalamnya ada sumber dana bantuan yang didapatkan oleh masyarakat penerima dan bantuan sebesar RP. 20.000.000 dimana 17.500.000 sebagai bahan material dalam proses pembuatan rumah bantuan dan sisanya 2.500.000 sebagai upah dari tukang dimana masyarakat penerima menerima bantuan ini di supplier tertentu. Dan masyarakat mengerjakan rumah selama kurun waktu 6 bulan ada juga diantara masyarakat mengikutui mapalus ada juga yang tidak. Bericara mengenai bahan

- yang didapatkan cukup baik untuk digunakan.
3. Hubungan antar organisasi dimana hubungan masyarakat dengan pemerintah dan juga tim pelaksana program bantuan ini memiliki hubungan yang baik dimana dengan adanya kunjungan langsung dari tim dalam proses menyakinkan masyarakat agar mau mengikuti program tersebut karena masyarakat dirasa layak untuk mendapat bantuan ini menurut tim dan pemerintah. Memang ada masyarakat yang sulit melengkapi segala tuntutan, namun pemerintah selalu mengupayakan kecuali memang masyarakat belum mempunyai lahan.
 4. Karakteristik agen pelaksana terkait dengan agen pelaksanaan program ini adalah Pemerintah desa, tim pelaksana program, masyarakat MBR, kementerian PUPR yang mengeluarkan program dan dibagikan ke kabupaten sampai pelosok desa. Dalam proses tahapan pembangunan tim pelaksana atau pendamping tetap melakukan monitoring atau pengawasan kepada pihak masyarakat yang menjadi penerima bantuan dilihat mereka mampu mengawasi dengan baik.
 5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik di desa moyonggung menimbulkan suatu kondisi sosial yang positif dikarenakan masyarakat sudah banyak yang membuat rumah bantuan sehingga dilihat dari lingkungan yang sudah nampak bersih dan sehat. Walaupun ada beberapa masyarakat yang masih belum berhak mendapatkan program bantuan ini dilihat dari aspek ekonomi sehingga ada masyarakat yang belum menyelesaikan tahapan pembangunan atau belum rampung ada juga masyarakat yang tidak mempunyai kendala berarti kecuali yang tidak menyelesaikan pembangunan bantuan tersebut.
 6. Disposisi implementor Pemerintah melihat dan mencari kriteria seorang penerima dengan adil dan sesuai dimana program ini sudah direalisasikan kepada yang membutuhkan sehingga ada banyak harapan masyarakat tentang kelangsungan program ini agar nantinya juga program tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya dengan baik.
- Saran**
1. Diharapkan kepada pemerintah dan juga tim pelaksana program bantuan ini agar lebih meningkatkan lagi proses penyelenggaraan secara langsung misalnya sosialisasi di balai desa agar dimana masyarakat semua dapat mendengar dan mengerti akan program BPSPS tersebut.
 2. Harus ada juga kesadaran masyarakat penerima bantuan BPSPS ini agar dapat saling membantu bergotong royong
 3. Harus ada peningkatan mengenai dana bantuan karena dana bantuan masih dirasa belum memadai atau mencukupi bagi masyarakat penerima yang lain.
 4. Diharapkan juga masyarakat penerima harus benar-benar siap dalam mengikuti program agar program bisa berjalan dengan baik dan pembangunan rumah bisa diselesaikan secara rampung
 5. Diharapkan kepada tim pelaksana program agar lebih lagi menjalankan program sebagaimana dengan tugas dan tanggung jawab dimana tim pelaksana harus lebih tegas

dalam hal mengarahkan masyarakat penerima. Agar program bantuan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Suratman (2017). *Generasi Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Capiya Publishing.
- Sinambela, L. P.2011. *Reformasi Pelayann Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta Bumi Aksara
- Sugiyono, *Memahamipenelitiankualitatif,bandung :Alfabeta, 2014*
- Wahab, A.S. 2017. *Analisiskebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik,Teori,Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS
- Widodo, J. 2018. *Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Kreatif
- Skripsi
- Amahoru, I. (2019). *Program BSBR di luwu timur sudah cover 3.659 rumah tidak layak huni*. News rakyatku.com
- Asriani,(2021) *implementasi bantuan stimulan bedah rumah di kecamatan towuti kabupaten luwu timur*
- Pratama Yoghi Citra, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di indonesia, vol, 4 no. 2, agustus 2014